



KEPALA DESA KARYAMUKTI
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA KARYAMUKTI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARYAMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARYAMUKTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
 - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 84).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYAMUKTI

Dan

KEPALA DESA KARYAMUKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARYAMUKTI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARYAMUKTI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.532.096.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.309.413.200,00
Surplus/Defisit	Rp	222.683.400,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	243.859,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	222.683.400,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(222.439.541,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	243.859,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARYAMUKTI.

Ditetapkan di : Desa Karyamukti
Pada tanggal : 30 December 2025



KEPALA DESA

SITI ROHMAT

Diundangkan di : Desa Karyamukti
Pada tanggal : 29 December 2025



SEKRETARIS DESA

ARDI JAENUDIN

LEMBARAN DESA KARYAMUKTI NOMOR 8 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.500.096.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.532.096.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	632.483.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	652.141.400,00	
5.3.	Belanja Modal	908.130.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.658.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.309.413.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	222.683.400,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	243.859,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	243.859,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	222.683.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	222.683.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(222.439.541,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	243.859,00	

KARYAMUKTI, 30 December 2025
 KEPALA DESA

 SITI ROHMAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.500.096.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.532.096.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.171.432.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	993.491.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.328.048,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.328.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	393.456.336,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	393.456.336,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.298.816,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.298.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	73.260.600,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.260.600,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	134.400.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	134.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe rkantoran, Pakaian Seragam, perj	21.838.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.838.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	237.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.703.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.703.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	29.406.400,00	ADD, PBP
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.406.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	127.941.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	91.190.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	91.190.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	36.751.400,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.751.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.800.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.200.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.200.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>851.372.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42.432.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.832.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.832.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	788.940.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	98.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	690.940.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	690.940.600,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>134.031.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	42.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.831.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.731.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.731.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.500.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.600.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.919.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.919.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.919.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.919.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>116.658.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.458.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.458.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.458.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.309.413.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	222.683.400,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	243.859,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	222.683.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(222.439.541,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	243.859,00	



KARYAMUKTI, 30 December 2025

KEPALA DESA

SITI ROHMAH